

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi dihapuskan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi dihapuskan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) mengakibatkan status DPO menjadi dihapuskan bahwa penetapan status DPO pada pokoknya tidak diatur secara jelas di dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, akan tetapi aturan tentang penetapan status DPO diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sehingga aturan mengenai pelaksanaan penetapan seseorang dalam DPO tidak memiliki dasar hukum yang kuat, walaupun dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada pokoknya hanya mengatur bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan jika telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka penetapan DPO dirasa kurang maksimal dan kurang kuat dasar/alasan hukumnya. Untuk penghapusan status DPO bisa dilakukan apabila sudah terjadi daluarsa sesuai dengan hukum Pasal 78 KUHP. Status DPO juga dapat dicabut apabila kurang atau tidak adanya alat bukti yang cukup; 2) Akibat hukum dari adanya keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi tercabut dan dihapuskan dalam buku daftar pencarian orang, serta akibat hukum lainnya terhadap kesalahan tersebut berupa merehabilitasi hak seseorang tersebut dan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti pada mulanya dengan dasar bahwa penetapan DPO yang dilakukan oleh penyidik telah salah ditetapkan kepada seseorang tersebut.

Kata Kunci: *Penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO), Keadilan Hukum.*

REMOVAL OF WANTED PERSONS LIST (DPO) FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL JUSTICE

viii

ABSTRACT

This study aims to 1) determine and analyze the legal regulations regarding the wrong determination of a person in the Wanted List (DPO) book resulting in the DPO status being removed; 2) to determine and analyze the legal implications of the wrong determination of a person in the Wanted List (DPO) book resulting in the DPO status being removed. The research method used is the normative legal research method and the approaches used are the statutory approach and the conceptual approach as well as the case approach. The analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations and assessing relevant legal materials. The results of the study show that 1) Legal regulations regarding the wrong determination of a person in the Wanted List (DPO) book result in the DPO status being removed that the determination of DPO status is basically not clearly regulated in the Criminal Procedure Code and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, however the rules regarding the determination of DPO status are regulated in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police, so that the rules regarding the implementation of the determination of a person in the DPO do not have a strong legal basis, although in the Regulation of the Chief of Police Number 14 of 2012 concerning the Management of Criminal Investigations in principle only regulates that the issuance of a DPO can be carried out if a summons has been made 3 (three) times, then the determination of the DPO is considered less than optimal and lacks a strong legal basis/reason. The removal of the DPO status can be done if it has expired in accordance with Article 78 of the Criminal Code. The DPO status can also be revoked if there is a lack or absence of sufficient evidence; 2) The legal consequences of a person being wrongly designated in the Wanted List (DPO) book result in the DPO status being revoked and deleted from the Wanted List, as well as other legal consequences of the error in the form of rehabilitating the person's rights and restoring their rights in their abilities, position and dignity as before on the basis that the DPO determination made by the investigator was wrongly assigned to the person.

Keywords: Deletion of Wanted List (DPO), Legal Justice.